



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN**

**Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman. Telp. (0274)868405, 865473 Pesawat 1245,
Fax. (0274) 865473 Kode Pos 55511**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat diselesaikan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan dan program yang dijabarkan melalui kegiatan, sekaligus merupakan wujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam laporan ini memuat hasil evaluasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sleman, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660501 199603 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
B. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4
BAB II	5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	5
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5
BAB III	24
CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	24
A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI	24
B. DANA KEISTIMEWAAN	30
BAB IV	31
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2023	31
BAB V	40
PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tabel Ringkasan ASN berdasar Urusan dan Fungsi	2
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	3
Tabel I. 3 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan	3
Tabel I. 4 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.....	4
Tabel II. 1 Capaian Kinerja Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2024.....	5
Tabel II. 2 Data Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2018-2024	6
Tabel II. 3 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman.....	6
Tabel II. 4 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2019 - 2024.....	6
Tabel II. 5 Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2024	7
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Keuangan DAK Fisik Tahun 2024.....	24
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Kegiatan DAK Fisik Tahun 2024	25
Tabel III. 3 Capaian Kinerja Keuangan DAK Nonfisik Tahun 2024.....	28
Tabel III. 4 Capaian Kinerja Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2024	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.



(Sumber : Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas)

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

2. Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepegawaian

- a. Ringkasan ASN berdasar Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel I. 1Tabel Ringkasan ASN berdasar Urusan dan Fungsi

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	5	10	15	30

b. Ringkasan jumlah ASN menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				PPPK	Jumlah
		IV	III	II	I		
1	Kepala	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	3	4	-	-	9
3	Bidang Koperasi	3	3	1	-	7	14
4	Bidang Usaha Mikro	2	4	-	-	-	6
Jumlah		8	10	5	0	7	30

c. Ringkasan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel I. 3 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Golongan						Jumlah
		S-2	S-1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	2	2	3	-	-	9
3	Bidang Koperasi	3	10	-	1	-	-	14
4	Bidang Usaha Mikro	2	4	-	-	-	-	6
Jumlah		8	16	2	4	0	0	30

Urusan yang diampu Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

B. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2024 sebesar 93,03% yaitu membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut.

Tabel I. 4 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Program Urusan Pemerintahan	Anggaran	Realisasi	Kinerja Keuangan
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	24.246.728.345,00	22.016.303.535,60	90,80%
Belanja Pegawai	4.556.482.352,00	4.259.620.373,00	93,48%
Belanja Barang dan Jasa	10.533.034.593,00	10.112.063.496,00	96,00%
Belanja Modal	9.157.211.400,00	7.644.619.666,60	83,48

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Capaian kinerja indikator Renstra Perangkat Daerah pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2024 sebagai berikut..

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Indikator Renstra Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2024

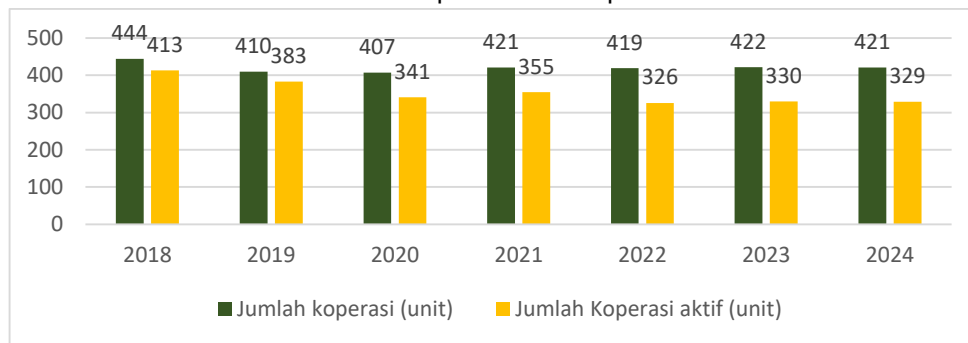
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rasio Pelaku Usaha Mikro	%	14	13.99	99.93%
2	Rasio keanggotaan koperasi	%	22.52	21.26	94.40%

Capaian Rasio pelaku usaha mikro terealisasi sebesar 13.99% dari yang ditargetkan sebesar 14% sehingga capaian kinerjanya 99.93%. Capaian Rasio keanggotaan koperasi terealisasi sebesar 21.26% dari yang ditargetkan sebesar 22.52% sehingga capaian kinerjanya 94.40%. Data perkembangan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai dengan 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Data Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2018-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	413	383	341	355	326	330	329
2	Jumlah koperasi (unit)	444	410	407	421	419	422	421
3	Persentase koperasi aktif (%)	93.01	93.41	83.78	84.38	77.8	78.20%	78.15
4	Jumlah Usaha mikro (unit)	35,682	40,887	67,414	89,197	90,535	109,757	109,961
5	Jumlah UMKM (unit)	36,653	41,852	68,382	89,871	90,557	109,936	110,142
6	Persentase usaha mikro	97.35	97.69	99.95	99.25	99.99	99.84%	99.84%

Tabel II. 3 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman



Tabel II. 4 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2019 - 2024

No	Uraian Data	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi	410	407	420	419	422	421
	Koperasi Unit Desa (KUD)	17	17	17	16	17	17
	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	4	3	3
	Koperasi Kerajinan/Industri	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Pegawai Negeri RI	71	69	70	68	67	65
	Koperasi Karyawan	28	28	25	25	24	22
	Koperasi Angkatan Darat	7	7	5	6	6	6
	Koperasi Angkatan Udara	4	4	4	3	2	2
	Koperasi Kepolisian	2	2	2	2	2	2
	Koperasi Serba Usaha	92	90	87	81	80	79
	BMT/KJKS	36	36	-	-	-	-
	Koperasi Pasar	4	4	4	3	3	3
	Koperasi Simpan Pinjam	67	67	66	67	66	65
	Koperasi Angkutan Darat	2	2	4	3	3	3
	Koperasi Angkutan Udara				1	1	1
	Koperasi Wisata	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Wanita	9	9	10	10	10	10
	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Wredatama	5	5	5	5	5	5
	Koperasi Pepabri	13	12	13	13	13	13
	Koperasi Mahasiswa	8	8	8	6	5	5
	Koperasi Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	-	-
	Koperasi Pertanian	13	13	13	15	15	16
	Koperasi Perikanan	-	-	1	0	0	0
	Koperasi Peternakan	4	4	4	4	3	3
	Koperasi Pusat/Sekunder	-	2	-	2	2	2
	Kopti	1	1	1	1	1	1

No	Uraian Data	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Koperasi Jasa	20	20	-	-	-	
	Koperasi Konsumen	-	-	-	-	-	
	Koperasi Produksi	-	-	-	-	-	
	Koperasi Pemasaran	-	-	-	-	-	
	Koperasi Lainnya	-	-	36	41	52	58
	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	-	-	36	37	36	34
	Koperasi Perkebunan	-	-	1	1	1	1
	Koperasi Profesi	-	-	1	1	1	1
	Koperasi Nelayan				1	1	1
2.	Jumlah Anggota Koperasi	292.008	226.850	229.831	186.893	183.025	167.084
3.	Jumlah Manajer (Orang)	108	91	85	81	74	73
4.	Jumlah Karyawan (Orang)	2.891	1.704	1.524	1.310	1.158	1.136
5.	Jumlah Koperasi RAT	410	227	206	196	201	216
6.	Penerbitan Badan Hukum Koperasi	11	5	12	4	5	9
7.	Penilaian Kesehatan USP/KSP:						
	Sehat	24	31	13	15	21	10
	Cukup Sehat	114	108	65	60	54	65
	Dalam Pengawasan (Kurang Sehat)	7	6	1	-	-	-
	Dalam Pengawasan Khusus (Tidak Sehat)	-	-	-	-	-	-
8.	Kondisi Koperasi						
	Koperasi Aktif	383	341	326	326	330	329
	Koperasi Tidak Aktif	27	66	94	93	92	92

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah didukung dengan beberapa program dengan capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

Tabel II. 5 Program dan Indikator Kinerja Program pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2024

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam				
	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin	%	32,65	32,86	100,64%
3	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi				
	Persentase koperasi yang aktif	%	78,67	78,15	99,34%
4	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi				
	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	28,05	13,33	47,52%
5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian				
	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	35,57	35,77	100,56%
6	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi				
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,23	13,52	102,19%

No	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin	Pelaku usaha mikro	735	2.675	363,95%
8	Program pengembangan umkm				
	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	13	20	153,85%

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah menggunakan anggaran sebesar Rp24.246.728.345,00 dengan realisasi sebesar Rp22.016.303.535,60 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 90,80%. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah didukung dengan 8 Program, 13 kegiatan dengan 36 sub kegiatan, sebagai berikut.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran Rp6.092.273.722,00 dengan realisasi keuangan Rp5.709.974.010,80 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 93,72%. Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.
- b. persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Keluaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dengan target persentase sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp19.309.997,00. dengan realisasi keuangan sebesar Rp17.912.388,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 92,76%.

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi didukung dengan beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki target keluaran (output) sub kegiatan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 4 dokumen dengan anggaran sebanyak Rp6.647.400,00. Realisasi keluaran (output) sub kegiatan sebesar 4 dokumen sehingga capaian kinerja 100,00% dan realisasi sebesar Rp6.484.805,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 97,55%.

2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD memiliki keluaran (output) sub kegiatan jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp1.439.747,00. Realisasi keluaran (output) sub kegiatan sebesar 100,00% yaitu 2 dokumen dan realisasi anggaran sebanyak Rp1.296.493,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 90,05%.

3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp1.180.950,00 dengan realisasi sebesar Rp1.169.547,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,03%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen (100,00%).

4) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp3.624.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.325.435,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 91,75%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi

penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen (100,00%).

5) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA sebesar Rp1.579.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.365.579,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 86,44%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.

6) Evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah menggunakan anggaran Rp4.837.500,00 dengan realisasi sebesar Rp4.270.529,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 88,28%. Keluaran (output) sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 18 dokumen terealisasi 18 dokumen (100,00%).

b. Administrasi keuangan perangkat daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp4.562.425.152,00 terealisasi sebesar Rp4.265.455.455,00 sehingga capaian kinerja keuangan kegiatan sebesar 93,49%. Keluaran (output) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerja 100,00%.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN didukung dengan anggaran sebesar Rp4.380.952.352,00 dengan realisasi sebesar Rp4.087.090.373,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93,29%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah orang yang

menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 31 orang terealisasi 100,00% yaitu 31 orang.

- 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp175.863.700,00 terealisasi sebesar Rp172.829.063 (98,27%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100,00%.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp5.609.100,00 dengan realisasi 98,70% yaitu sebesar Rp5.536.019,00. Keluaran (output) sub kegiatan adalah:

- (a) laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan target 16 laporan terealisasi 16 laporan sehingga capaian kinerja 100,00%.
- (b) Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD target 16 laporan terealisasi 16 laporan sehingga capaian kinerja 100,00%.

- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp20.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.959.560,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,01%. Keluaran (output) kegiatan adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100,00% terealisasi 100,00%.

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp20.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.959.560,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,01%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen pendataan dan

pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (100,00%).

d. Administrasi umum perangkat daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp511.909.000,00 terealisasi sebesar Rp485.152.267,00 atau tercapai sebesar 94,77%. Keluaran (output) kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target sebesar 100,00% terealisasi 100,00%.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp22.864.650,00 terealisasi sebesar Rp20.181.169 (88,26%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket (100,00%).

2) Penyediaan peralatan rumah tangga

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp2.680.800,00 terealisasi sebesar Rp2.680.000,00 atau tercapai sebanyak 99,97%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 100,00%.

3) Penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp108.166.450,00 terealisasi sebesar Rp94.961.910,00 atau tercapai sebesar 87,79%. Keluaran (output) sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket (100,00%).

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp11.056.200,00 terealisasi sebesar Rp10.835.196,00 atau tercapai sebesar 98,00%. Keluaran

(output) sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 1 paket (100,00%).

- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau tercapai 0%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 0 dokumen terealisasi 0%.
- 6) Fasilitasi kunjungan tamu
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebanyak Rp14.125.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp13.399.100,00 atau tercapai sebesar 94,86%. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang merupakan keluaran (output) sub kegiatan tercapai 100,00% yaitu dari target 12 laporan terealisasi 12 laporan.
- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp110.737.700,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp106.698.579,00 dengan kata lain tercapai sebesar 98,16%.
Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 5 laporan terealisasi 5 laporan (100,00%).
- 8) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Alokasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp18.385.100,00 terealisasi sebesar Rp17.631.471,00 atau tercapai sebesar 95,90%. jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau tercapai 100,00%.
- 9) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp223.893.100,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp216.764.842,00 dengan kata lain tercapai sebesar 96,82%. jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.

e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp502.732.650,00 dengan realisasi sebesar Rp486.866.577,80 (96,84%). Keluaran (output) kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah dengan target 100,00% terealisasi 100,00%.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan berikut:

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan (100,00%).

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi anggaran pelaksanaan sub sebesar Rp90.450.000,00 terealisasi sebesar Rp87.499.880,00 atau tercapai sebesar 96,74%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp409.282.650,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp396.366.697,00 dengan kata lain tercapai sebesar 96,84%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan

penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 3 laporan terealisasi 100,00%.

- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp475.736.923,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp434.627.763,00 atau tercapai sebesar 91,36%. Keluaran (output) kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dengan target 100,00% terealisasi 100,00%.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp141.482.500,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp108.235.511,00 dengan kata lain tercapai sebesar 76,50%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 9 unit terealisasi 9 unit.
- 2) Pemeliharaan mebel
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp17.900.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.900.000,00 dengan kata lain tercapai sebesar 100,00%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara dari target 5 unit terealisasi 5 unit (100,00%).
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp40.028.500,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp36.928.650,00 dengan kata lain tercapai sebesar 92,26%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan

mesin lainnya yang dipelihara dengan target 14 unit terealisasi 14 unit (100,00%).

4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp276.325.923,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp271.563.602,00 dengan kata lain tercapai sebesar 98,28%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 unit terealisasi 2 unit (100,00%).

2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam

Program ini memiliki indikator kinerja program yaitu persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin target 32,65% dengan anggaran sebesar Rp33.095.000,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 32,87% sehingga capaian kinerja mencapai 100,67% dan realisasi anggaran sebesar Rp26.803.629,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 80,99%.

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam didukung dengan kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp33.095.000,00 terealisasi sebesar Rp26.803.629,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 80,99%. Keluaran (output) kegiatan adalah persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin dengan target 32,65% terealisasi 32,87% sehingga capaian kinerja keluaran (output) kegiatan sebesar 100,67%

Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan keluaran (output) jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 30 koperasi terealisasi 82 koperasi (273,33%).

3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang aktif dengan target 78,67% dengan anggaran sebesar Rp5.224.750,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 78,15% sehingga capaian kinerja mencapai 99,34% dan realisasi anggaran sebesar Rp4.993.161,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 95,57%.

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi didukung dengan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp5.224.750,00 terealisasi sebesar Rp4.993.161,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,57%. Keluaran (output) kegiatan adalah persentase koperasi yang aktif dengan target sebesar 78,67% terealisasi sebesar 78,15% sehingga capaian kinerja sebesar 99,34%.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota terdiri dari sub kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota dengan keluaran (output) sub kegiatan jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota dengan target 10 unit usaha terealisasi 13 unit usaha (130,00%).

4. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat target 28,05% dengan anggaran sebesar Rp87.849.300,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 13,33% sehingga capaian kinerja mencapai 47,52% dan realisasi anggaran sebesar Rp86.136.731,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 98,05%.

Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi didukung dengan kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp87.849.300,00 dan terealisasi sebesar Rp86.136.731,00

(98,05%). Keluaran (output) kegiatan adalah persentase KSP/USP koperasi sehat dengan target 28,05% terealisasi sebesar 13,33% sehingga capaian kinerja keluaran kegiatan 47,52%.

Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota terdiri dari sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp87.849.300,00 dan terealisasi sebesar Rp86.136.731,00 (98,05%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dengan target 75 unit usaha terealisasi 75 unit usaha (100,00%).

5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian memiliki indikator kinerja program yaitu persentase pengelola koperasi yang bersertifikat target 35,57% dengan anggaran sebesar Rp649.458.200,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 35,77% sehingga capaian kinerja mencapai 100,56% dan realisasi anggaran sebesar Rp601.082.181,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 92,55%.

Program pendidikan dan latihan perkoperasian didukung dengan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp649.458.200,00 terealisasi Rp601.082.181,00 (92,55%). Keluaran (output) kegiatan adalah persentase pengelola koperasi yang bersertifikat dengan target 35,57% terealisasi 35,77% sehingga capaian kinerja kegiatan 100,56%. Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan target 425 orang terealisasi 456 orang sehingga capaian kinerja 109,41%.

6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan volume usaha koperasi target 13,23% dengan anggaran sebesar Rp243.398.725,00. Realisasi program ini secara

fisik terealisasi 13,52% sehingga capaian kinerja mencapai 102,19% dan realisasi anggaran sebesar Rp243.398.725,00 dengan tingkat kinerja keuangan program 99,37%.

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi didukung dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan keluaran (output) kegiatan persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 13,23% terealisasi 13,52% sehingga capaian kinerja 102,9%.

Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota terdiri dari sub kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan keluaran (output) jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan target 12 koperasi terealisasi 10 koperasi (83,33%).

7. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini memiliki indikator kinerja program yaitu Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin target 735 pelaku usaha dengan anggaran sebesar Rp5.787.708.648,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 2.675 pelaku usaha sehingga capaian kinerja mencapai 363,95% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.528.351.052,20 dengan tingkat kinerja keuangan program 95,52%.

Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) didukung dengan kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan keluaran (output) kegiatan jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin dengan target 735 pelaku usaha terealisasi 2.675 pelaku usaha sehingga capaian kinerja 363,95%.

Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan keluaran (output) kegiatan jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 1.445,83% dengan anggaran sebesar Rp1.629.189.950,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 1.445,83% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.545.912.567,80 dengan kata lain tercapai sebesar 94,89%. Keluaran sub kegiatan yaitu jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target 120 unit usaha terealisasi 1.735 unit usaha (1.445,83%).
- 2) **Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro**
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp309.249.100,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp307.718.404,80 dengan kata lain tercapai sebesar 99,51%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro dengan target 30 unit usaha terealisasi 30 unit usaha sehingga capaian kinerja 100,00%.
- 3) **Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro**
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 466,67% dengan anggaran sebesar Rp354.363.100,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 466,67% dan realisasi anggaran sebesar Rp312.563.682,80 dengan kata lain tercapai sebesar 88,20%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan dengan target 75 unit usaha terealisasi 350 unit usaha (466,67%).
- 4) **Penyusunan Basis Data Usaha Mikro**
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 500 Unit Usaha dengan anggaran sebesar Rp3.494.906.498,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 112,00% dan realisasi anggaran

sebesar Rp3.362.156.396,80 dengan kata lain tercapai sebesar 96,20%. Keluaran (output) sub kegiatan yaitu Jumlah unit usaha mikro terdata dengan target 500 unit usaha terealisasi 560 unit usaha (112,00%)

8. Program pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM memiliki indikator kinerja program yaitu jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha target 13 usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp11.347.720.000,00. Realisasi program ini secara fisik terealisasi 20 usaha mikro sehingga capaian kinerja mencapai 153,85% dan realisasi anggaran sebesar Rp9.817.090.255,60 dengan tingkat kinerja keuangan program 86,51%.

Program pengembangan UMKM didukung dengan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan keluaran (output) jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan target 13 usaha mikro terealisasi 20 usaha mikro (153,85%).

Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil didukung dengan sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan keluaran (output) sub kegiatan jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan target 460 unit usaha terealisasi 460 unit usaha

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengelola koperasi yang tersertifikasi baru sebesar 35,77%, perlu peningkatan kompetensi agar kinerja koperasi dapat ditingkatkan.
2. Eksistensi koperasi semakin tergerus dengan banyaknya jasa pinjaman baik offline maupun online yang menawarkan kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi digital.
Peraturan
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebabkan masyarakat merasa terlalu berat persyaratan mendirikan koperasi, sehingga bagi

masyarakat yang belum bisa memenuhi persyaratan pendirian koperasi memutuskan untuk ber pra koperasi terlebih dahulu

4. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum dapat memberikan layanan kepada UMKM secara optimal. Ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di PLUT seperti lapak UMKM Sembada, namun penjualan dan pengunjung belum stabil dikarenakan keterbatasan baik dari informasi, tempat maupun sarana dan prasarana.
5. UKM sangat termotivasi untuk mengembangkan produknya, tetapi inovasi dan pengembangan kreasi produk yang dikembangkan tidak didasarkan dengan informasi dan permintaan pasar dengan harga pokok produksi yang relatif mahal. Hal ini menyebabkan produk yang dikembangkan kurang berdaya saing dan tidak bisa diserap pasar dengan baik.
6. Informasi terkait pelaksanaan Bimtek atau Pelatihan belum bisa terakses oleh semua lapisan masyarakat.
7. Kesulitan dalam mencari lokasi kegiatan seperti pelatihan yang kurang representative jika harus mendekati lokasi pengusul kegiatan, beberapa lokasi pameran kurang strategis sehingga kurang dapat menarik pengunjung dan meningkatkan daya beli.

Solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan adanya permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Mendorong pengurus dan pengelola koperasi untuk dapat mengikuti sertifikasi secara mandiri agar dapat bersaing dengan lembaga lainnya.
2. Melaksanakan 3 kebijakan strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan sebagai program strategis dalam kerangka penataan koperasi, merubah paradigma dari kuantitas koperasi menjadi kualitas serta pengembangan koperasi menuju koperasi modern.
3. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perkoperasian kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda agar lebih memahami dan siap untuk membentuk dan menjalankan koperasi dengan baik.
4. Upaya peningkatan daya tarik dilakukan dengan mengadakan hiburan musik serta membuat flyer yang dipublikasi melalui mealui media social dan website Dinas.

5. Mengupayakan perluasan Informasi dari market intelligence untuk menjadi acuan dalam pengembangan dan kreasi produk UKM, agar produk yang dihasilkan langsung bisa diserap pasar.
6. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman membuat flyer, link pendaftaran yang dipublikasi melalui media sosial serta website Dinas. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi ke wilayah pengusul yang dihadiri perangkat desa dan atau Kapanewon
7. Mengoptimalkan pemilihan lokasi kegiatan dengan mempertibangkan daya tarik pengunjung.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2024 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (*output*) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

1. Tugas Pembantuan DAK FISIK

a. Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 1 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan, Aang Transfer Ke Daerah
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

b. Capaian Kinerja

- 1) Capaian Kinerja Keuangan

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Keuangan DAK Fisik Tahun 2024

No	Keterangan	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Anggaran Fisik (DAK)	Pembangunan Gedung PLUT KUKM Sleman Barat (Lelang)	5,500,000,000	4,250,100,888	1,249,899,112	77.27%
		Sarana Prasarana (Sarpras) :				
		Peralatan Kantor Elektronik	512,943,200	511,450,000	1,493,200	99.71%
		Peralatan Multimedia PLUT	565,052,800	564,990,000	62,800	99.99%
		Perlengkapan Rumah Tangga Non Elektronik PLUT	41,894,690	25,957,183	15,937,507	61.96%
		Peralatan Inkubator Kriya Wastra PLUT	73,420,000	72,150,000	1,270,000	98.27%
		Perlengkapan Rumah Tangga Elektronik PLUT	956,847,236	929,650,000	27,197,236	97.16%
		Meubeler Custom PLUT	816,460,374	681,847,981	134,612,393	83.51%
		Meubeler PLUT	163,945,700	143,260,000	20,685,700	87.38%

No	Keterangan	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
		Peralatan Kemasan PLUT	164,547,000	163,503,000	1,044,000	99.37%
2	Anggaran Support (APBD)	Pra-Pembangunan				
		Pematangan Lahan Gd. PLUT	97,000,000	87,124,615	9,875,385	89.82%
		Pembangunan				
		Konsultan Pengawas Pembangunan Gd PLUT (hanya 4 bulan)	250,000,000	200,006,000	49,994,000	80.00%
		Honor Tim Pembangunan				
		Tim Teknis	13,250,000	13,250,000	-	100.00%
		Tim Sekretariat	5,650,000	5,650,000	-	100.00%
		Makan/Minum Rapat (Konsumsi) & Narsum Sosialisasi				
		Konsumsi Makan/Snack (Global)	17,500,000	24,021,250	(6,521,250)	137.26%
		Narasumber Sosialisasi	1,000,000	-	1,000,000	0.00%
		SPPD Konsultasi Ke Kementerian Kop UMKM				
		SPPD Konsultasi Jakarta	7,016,000	5,364,378	1,651,622	76.46%
		CetakCetak				
		Bahan Cetak	583,800	573,958	9,842	98.31%
TOTAL			9,187,110,800	7,678,899,253	1,508,211,547	

2) Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Kegiatan DAK Fisik Tahun 2024

No	Keterangan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Anggaran Fisik (DAK)	Pembangunan Gedung PLUT KUKM Sleman Barat (Lelang)	100%	100%	100%
		Sarana Prasarana (Sarpras) :			
		Peralatan Kantor Elektronik	1 paket	1 paket	100%
		Peralatan Multimedia PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Perlengkapan Rumah Tangga Non Elektronik PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Peralatan Inkubator Kriya Wastra PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Perlengkapan Rumah Tangga Elektronik PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Meubeler Custom PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Meubeler PLUT	1 paket	1 paket	100%

No	Keterangan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Peralatan Kemasan PLUT	1 paket	1 paket	100%
2	Anggaran Support (APBD)	Pra-Pembangunan			
		Pematangan Lahan Gd. PLUT	1 paket	1 paket	100%
		Pembangunan			
		Konsultan Pengawas Pembangunan Gd PLUT (hanya 4 bulan)	1 paket	1 paket	100%
		Honor Tim Pembangunan			
		Tim Teknis	100%	100%	100%
		Tim Sekretariat	100%	100%	100%
		Makan/Minum Rapat (Konsumsi) & Narsum Sosialisasi			
		Konsumsi Makan/Snack (Global)	100%	100%	100%
		Narasumber Sosialisasi	100%	0	0.00%
		SPPD Konsultasi Ke Kementerian Kop UMKM			
		SPPD Konsultasi Jakarta	100%	100%	100%
		CetakCetak			
		Bahan Cetak	100%	100%	100%

c. Permasalahan dan Solusi

1. Adanya keterlambatan *progress* pekerjaan oleh Kontraktor disebabkan terbatasnya area gerak di lokasi pembangunan dan kurangnya personil.
2. Adanya keterbatasan *stock* keramik yang seragam di toko-toko besar penyedia yang dihubungi oleh Kontraktor.
3. Setelah PHO atau *Provisional Hand Over* masuk masa pemeliharaan 6 Bulan ditemukan *deffect* atau kekurangan dalam hal ada air masuk di dari atas, cat mengelupas dan air meresap, serta jaringan listrik ada yang tidak hidup

Solusi

1. Memberikan penjelasan bersama dengan Tim Teknis PUPKP Kabupaten Sleman dan Konsultan Pengawas pentingnya Manajemen Kerja Bahan/Material dan SDM, setelah solusi diberikan dan dilakukan sesuai dengan rekomendasi terjadi percepatan *progress* tetapi karena memang

sudah tertinggal cukup jauh dari target maka selesai proyek mundur 9 hari dan kontraktor sudah membayar denda keterlambatan.

2. Rapat dan menghitung bersama kebutuhan riil, akhirnya dibagi per ruangan untuk jenis keramiknya walaupun tidak sama motifnya tetapi merk dan spesifikasi tetap diusahakan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak
3. Rapat dan periksa bersama setelah terjadi hujan di musim hujan baru terlihat area yang bocor dihimpun data rekap perbaikannya kemudian dikerjakan oleh kontraktor penyedia di masa pemeliharaan dan sudah dilaksanakan

2. Tugas Pembantuan DAK Non Fisik PK2UKM

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil (DAK Nonfisik PK2UKM).
- 2) Berdasarkan penetapan tugas Tenaga Pendamping Diklat Pada Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman : Nomor: 814/0455 Tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik PK2UKM) Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
- 3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang Pengesahan DPA Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2024.

b. Capaian Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2024 yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil, mendapatkan alokasi dana DAK sebesar Rp 504.696.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Pelatihan Rp 421.176.000,00 berupa pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan.
- Pendampingan Rp 83.520.000,00 berupa honor pendamping dan biaya lainnya.

1) Capaian Kinerja Keuangan

Tabel III. 3 Capaian Kinerja Keuangan DAK Nonfisik Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Sisa Anggaran	Persentase Output
		Pagu APBN	Realisasi penggunaan		
		(Rp)	(Rp)		
I	Pelatihan	421.176.000	414.271.079	6.904.921	98,36%
1	Pelatihan Perkoperasian	164.873.400	160.129.156	4.744.244	97,12%
2	Pelatihan Kewirausahaan	167.454.000	165.663.510	1.790.490	98,93%
3	Pelatihan Kompetensi berdasarkan Standar dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	88.848.600	88.478.413	370.187	99,58%
II	Pendampingan	83.520.000	75.915.560	7.604.440	90,90%
1	Honor pendamping	62.400.000	62.400.000	0	100,00%
2	Koordinator Pendamping	6.000.000	0	6.000.000	0,00%
3	Transport Pendamping	7.200.000	7.200.000	0	100,00%
4	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.504.000	3.504.000	0	100,00%
5	Seleksi	4.416.000	2.811.560	1.604.440	63,67%
	Total	504.696.000	490.186.639	14.509.361	97,13%

2) Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tugas Pembantuan

Tabel III. 4 Capaian Kinerja Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan		Persentase Output
		Jumlah Penerimaan Manfaat		Jumlah Penerima Manfaat		
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
I	Pelatihan	185	Peserta	160	Peserta	86,49%
1	Pelatihan Perkoperasian	100	Peserta	100	Peserta	100,00%
2	Pelatihan Kewirausahaan	60	Peserta	60	Peserta	100,00%

3	Pelatihan Kompetensi berdasarkan Standar dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	25	Peserta	25	Peserta	100,00%
II	Pendampingan					
1	Honor pendamping	2	Orang/12 Bulan	2	Orang/12 Bulan	100%
2	Koordinator Pendamping	1	Orang/12 Bulan	1	Orang/12 Bulan	0,00%
3	Transport Pendamping	24	Bulan	12	Bulan	50,00%
4	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	24	Bulan	12	Bulan	50,00%
5	Seleksi					

c. Permasalahan dan Solusi

Selama kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman memiliki beberapa hambatan/kendala antara lain:

- a) Masih kurangnya pemahaman SDM koperasi baru terhadap pengelolaan koperasi yang baik dan sesuai regulasi yang berlaku
- b) Rendahnya pemahaman SDM koperasi akan pentingnya sertifikasi kompetensi dalam pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan
- c) Beberapa KSP/USP Koperasi masih belum memiliki kesadaran untuk memperbaiki tata kelola koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- d) Rendahnya implementasi materi yang didapatkan saat pelatihan dalam pengelolaan koperasi.
- e) Ada beberapa UMKM peserta pada waktu pendampingan berbarengan dengan kegiatan lain yang sama-sama untuk pengembangan usaha sehingga tidak bias mengikuti kegiatan pendampingan.
- f) Lokasi pendampingan UMKM yang jauh dari lokasi usaha, sehingga membuat UMKM datang kurang tepat waktu pada saat pendampingan.

Solusi

- a) Perlu adanya pelatihan dasar dan pendampingan secara berkelanjutan dalam pengelolaan koperasi bagi koperasi baru.
- b) Program fasilitasi uji kompetensi bagi SDM koperasi diharapkan selalu dilaksanakan dari tahun ke tahun oleh Dinas sebagai upaya pembinaan dalam peningkatan kualitas koperasi.

- c) Perlu adanya himbauan tegas dari Dinas kepada KSP/USP Koperasi agar segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.
- d) Perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pasca pelatihan sehingga dapat diketahui dampak dari program pelatihan.
- e) UMKM yang tidak bisa hadir pada waktu pendampingan diwajibkan mewakilkan pengelola usaha yang lain atau keluarganya yang mengetahui seluk beluk usaha.
- f) Waktu pendampingan disesuaikan dengan peserta sehingga dapat datang semua dan tepat waktu.

B. DANA KEISTIMEWAAN

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	REKOMENDASI DPRD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	HAL YANG SUDAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024	TINDAK LANJUT PADA TAHUN ANGGARAN 2024
B	BIDANG KEUANGAN			
1.	<p>Beberapa rekomendasi terbatas khususnya terkait UMKM:</p> <p>a) Kurangnya informasi secara kontekstual terkait penggunaan Rasio yang menjadi indikator sasaran menyebabkan klaim capaian sasaran menjadi tidak jelas. Contoh: "Capaian Rasio pelaku usaha mikro terealisasi sebesar 13,50% dari yang ditargetkan sebesar 11,00% sehingga capaian kinerjanya 122,69%." Apa maksud pernyataan ini? Apa makna angka 13,5%? Apa maksud rasio pelaku usaha mikro? Agar rasio-rasio yang digunakan sebagai indikator sasaran dijelaskan definisi operasionalnya dan angka-angka yang diklaim secara kuantitatif sebagai keberhasilan mencapai sasaran dijelaskan makna kontekstualnya.</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>a. Berdasarkan RPJMD dan Renstra 2021-2026 Tujuan : Berkembangnya UMKM dan Koperasi Indikator Tujuan : Rasio Pelaku Usaha Mikro Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM Target 2023 : 11%</p> <p>Definisi Operasional : Rasio Pelaku Usaha Mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun n Indikator : Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro</p> <p>Definisi operasional yang dipergunakan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman mengacu pada regulasi terbaru yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>Rumus : Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif pada tahun n dikalikan 100%</p>	<p>Pada Tahun 2024 untuk perhitungan Rasio Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan rumus dari amanat PP Nomor 7 Tahun 2021. Dengan rumus sesuai dengan jawaban di kolom rencana tindak lanjut.</p>

			<p>Perhitungan: Jumlah pelaku usaha mikro : 109.757,00 Jumlah penduduk usia produktif (14-65) : 813.262,00 Rasio : 13,5% Perhitungan rasio pelaku usaha disesuaikan dengan rumus yang ada pada Renstra</p> <p>Penjelasan: Bahwa untuk mengetahui ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan yakni melalui pengukuran rumus rasio pelaku usaha mikro, dari hasil perhitungan rasio diatas menunjukkan bahwa penduduk usia produktif yang menjadi pelaku usaha mikro sebesar 13,5% diatas yang telah ditargetkan sebesar 11%. Dengan demikian secara kuantitatif sasaran yang telah ditargetkan tercapai dengan tingkat capaian sebesar 2,5% diatas yang telah ditargetkan. Capaian keberhasilan program dan kegiatan tidak bisa tercermin dalam Renstra karena dalam satu program di dalamnya memuat banyak kegiatan dan sub kegiatan dan dengan sistem SIPD yang saat ini digunakan dalam pembuatan naskah perencanaan dan dokumen anggaran tidak muncul output dan outcome dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Akan dilakukan revisi di Renstra tahun berikutnya</p>	
	b) Di sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, Keluaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	b. Kemitraan Usaha Mikro yang dimaksudkan pada kegiatan ini adalah	jumlah unit usaha yang telah melakukan kemitraan usaha mikro dengan target 30 unit

	<p>(output) sub kegiatan adalah jumlah unit usaha yang telah melakukan kemitraan usaha mikro dengan target 30 unit usaha teralisasi 100 unit usaha sehingga capaian kinerja 333,33% Agar dijelaskan KEMITRAAN seperti apa yang telah dilakukan sehingga realisasinya sampai 300%. Capaian yang sangat tinggi patut diapresiasi. Namun, bisa jadi karena tidak tepat dan akuratnya perencanaan maka targetnya terlalu rendah.</p>		<p>bermitranya pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Capaian sampai dengan 300% karena adanya capaian ditahun sebelumnya yang diakumulasikan di tahun 2023 Akan dilakukan revisi di Renstra tahun berikutnya</p>	<p>usaha teralisasi 100 unit usaha sehingga capaian kinerja 333,33%</p> <p>Target Kemitraan yang semula ditargetkan sebesar 30 unit tetepi tercapai hingga 100 unit, disebabkan karena bertumbuhnya jumlah jasa usaha pariwisata yang dapat diajak untuk bermitra seperti misalnya toko oleh-oleh sehingga bisa lebih banyak menampung berbagai jenis produk UMKM.</p> <p>Kegiatan kemitraan untuk tahun 2024 juga merambah sampai ke luar DIY, yaitu Kabupaten dan Kota Magelang, yang tentunya membuka peluang jaringan usaha dan kemitraan bagi UMKM Kabupaten Sleman.</p> <p>Selain itu, organisasi Forkom UMKM tingkat Kabupaten aktif untuk membantu menjembatani anggotanya dalam bermitra.</p> <p>Beberapa UMKM sudah melakukan program kemitraan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pingrasa bermitra dengan Toko oleh-oleh Getuk Marem • ADHISTA SNACK bermitra dengan SEKAR KEDHATON • GIARVA bermitra dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) • ARUMANIS HAJI ARDI bermitra dengan PHRI • MAHANANI bermitra dengan PHRI • MAHANANI bermitra dengan SEKAR KEDHATON • ARUMANIS HAJI ARDI bermitra dengan PESONA KETEP
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • DWI SUSILAWATI bermitra dengan TOKO OLEH-OLEH GETUK MAREM • ABYAN SNACK bermitra dengan PHRI • MAHANANI bermitra dengan PESONA KETEP • ETA ENDOTAMA bermitra dengan PHRI
	<p>c) Di Program pengembangan UMKM memiliki indikator kinerja program yaitu jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha target 10 usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp1.573.474.300,00. Program pengembangan UMKM didukung dengan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan keluaran (output) jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan target 10 usaha mikro</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>c. Anggaran sebesar Rp. 1.573.474.300,00 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Digital Marketing Tingkat Lanjut dengan jumlah peserta 120 UMKM • Bimtek Packaging, Design dan Branding dengan jumlah peserta 240 UMKM • Bimtek Pemasaran/ Marketingoffline dan Online dengan jumlah peserta 40 orang • Bimtek aksesibilitas ke Sleman Marketplace dengan peserta 80 orang • Pameran UMKM (Pasar Lebaran) dengan jumlah peserta 100 orang • Festival UMKM secara offline dan online (Kendi Sembada) dengan jumlah peserta 100 orang • Pameran Insidental berupa kontribusi dalam Pameran Potensi Daerah, HUT Forkom UMKM. • Subsidi Ongkir dengan target untuk 100 UMKM 	<p>Anggaran sebesar Rp. 1.573.474.300,00 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Digital Marketing Tingkat Lanjut dengan jumlah peserta 120 UMKM • Bimtek Packaging, Design dan Branding dengan jumlah peserta 240 UMKM • Bimtek Pemasaran/ Marketingoffline dan Online dengan jumlah peserta 40 orang • Bimtek aksesibilitas ke Sleman Marketplace dengan peserta 80 orang • Pameran UMKM (Pasar Lebaran) dengan jumlah peserta 100 orang • Festival UMKM secara offline dan online (Kendi Sembada) dengan jumlah peserta 100 orang • Pameran Insidental berupa kontribusi dalam Pameran Potensi Daerah, HUT Forkom UMKM. • Subsidi Ongkir dengan target untuk 100 UMKM

	<p>d) Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil didukung dengan sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan keluaran (output) sub kegiatan jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan target 460 unit usaha terealisasi 460 unit usaha (100,00 %).</p>		<p>Poin d, e, dan f merupakan suatu rangkaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra, RKPD yang kemudian dituangkan dalam DPA sebagai berikut :</p> <p>Program : Pengembangan UMKM Indikator Kinerja Program : Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Target Indikator : 10</p> <p>Kegiatan : Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil Keluaran : Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Target keluaran : 10 usaha mikro</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi Keluaran : Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Target keluaran : 460 usaha mikro</p> <p>d. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan oreintasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil didukung dengan pelaksanaan sub-sub kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Digital Marketing Tingkat Lanjut dengan jumlah peserta 120 UMKM • Bimtek Packaging, Design dan Branding dengan jumlah peserta 240 UMKM 	<p>sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan keluaran (output) sub kegiatan jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan target 460 unit usaha terealisasi 460 unit usaha (100,00 %). Angka-angka output jika tidak diberi penjelasan lengkap akan membuat kebingungan untuk memahami LKPJ ini</p> <p>Capaian angka 460 unit berasal dari jumlah UMKM yang sudah melaksanakan pemasaran secara digital, yang merupakan hasil dari pelatihan digital marketing tingkat dasar, menengah dan tingkat lanjut yang tersebar di beberapa wilayah, UMKM sudah melakukan pemasaran dan transaksi secara online yang merupakan salah satu kriteria/parameter UMKM naik kelas</p>
--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ● Bimtek Pemasaran/ Marketingoffline dan Online dengan jumlah peserta 40 orang ● Bimtek aksesibilitas ke Sleman Marketplace dengan peserta 80 orang ● Pameran UMKM (Pasar Lebaran) dengan jumlah peserta 100 orang ● Festival UMKM secara offline dan online (Kendi Sembada) dengan jumlah peserta 100 orang ● Pameran Insidental berupa kontribusi dalam Pameran Potensi Daerah, HUT Forkom UMKM. ● Subsidi Ongkir dengan target untuk 100 UMKM ● Sehingga jumlah UMKM yang terfasilitasi pada kegiatan ini adalah sebesar : 780 UMKM 	
	<p>e) Angka-angka output jika tidak diberi penjelasan lengkap akan membuat kebingungan untuk memahami LKPJ ini. Semula disebutkan jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan target 10 usaha mikro dengan realisasi Rp1.573.474.300,00. Namun kemudian ada sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dengan target 460 unit usaha terealisasi 460 unit usaha (100,00%), tanpa menyebutkan adanya</p>		<p>e. Di LKPJ berikutnya akan kami lengkapi dengan data rincian capaian out dan outcome kegiatan dan sub kegiatan yang programnya tertuang dalam Renstra</p>	<p>sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan keluaran (output) sub kegiatan jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan target 460 unit usaha terealisasi 460 unit usaha (100,00 %). Angka-angka output jika tidak diberi penjelasan lengkap akan membuat kebingungan untuk memahami LKPJ ini</p> <p>Capaian angka 460 unit berasal dari jumlah UMKM yang sudah melaksanakan pemasaran secara digital, yang merupakan hasil dari pelatihan digital marketing tingkat</p>

				<p>dasar, menengah dan tingkat lanjut yang tersebar di beberapa wilayah, UMKM sudah melakukan pemasaran dan transaksi secara online yang merupakan salah</p>
	<p>f) Jadi bagaimana keterkaitan antara 10 usaha mikro dan 460 unit usaha ini? Bagaimana output ini diyakini akan dapat memenuhi salah satu tujuan dari Misi 3 yaitu Menurunnya ketimpangan pendapatan? Agar sekurang-kurangnya di LKPJ disebutkan dari 10, 40, 100, 460 atau 500 umkm yang telah mendapatkan intervensi dari Diskop UKM melalui Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dan Program pengembangan UMKM, berapa UMKM di akhir tahun anggaran yang dianggap telah berhasil memenuhi tujuan dan sasaran dari Misi 3?</p>		<p>f. 10 Usaha Mikro hanyalah bagian dari salah satu capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang ada di dalam program Pemberdayaan UMKM dan ini berkaitan pula dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur klasifikasi yang berbeda pada defisini usaha mikro. Sehingga akan dilakukan revisi Renstra di than yang akan datang</p>	<p>Jadi bagaimana keterkaitan antara 10 usaha mikro dan 460 unit usaha ini? antara angka 10 wirausaha dengan 460 UMKM tidak saling terkait karena pokok bahasan kegiatan dan target berbeda. 10 unit usaha adalah penumbuhan wirausaha baru, yang secara regulasi merupakan pelaku usaha yang sudah berusaha secara berkelanjutan selama 3 tahun berturut-turut, sedangkan 460 unit usaha UMKM adalah pelaku usaha lama yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada tahun 2024 untuk anggaran Rp. 2.160.609.200 dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Digital Marketing tingkat lanjut (PUPM) Kap. Depok, Kal Tegaltirto, Banyurejo, Margomulyo sebanyak (80 Pelaku Usaha) 20 Pelaku Usaha / Angkatan - Workshop Forkom UMKM (PUPM) Kap Godean, Kalasan, Cangkringan, Kal Caturtunggal (200 Pelaku Usaha) 50 Pelaku Usaha / Angkatan - Bimtek Foto produk UMKM dan Desain Grafis (POKIR) Kalurahan Sukoharjo (25 Pelaku Usaha) - Bimtek Packing, Design dan Branding (PUPM) Kal Bokoharjo dan Caturtunggal (40 Pelaku Usaha) 20 Pelaku Usaha / Angkatan - Pameran Potensi Daerah 296 stand - Temu Kemitraan 100 Pelaku Usaha

				<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Forkom UMKM tingkat Kabupaten 37 Pelaku Usaha - Pasar lebaran 100 Pelaku Usaha - Pameran Kemitraan 17 stand, yang digunakan oleh 17 Forum Komunikasi UMKM Kapanewon dan 1 Forum Komunikasi UMKM Kabupaten
	<p>g) Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2023 adalah UKM minim inovasi dan literasi IT. Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah "Mengupayakan perluasan Informasi dari market intelligence untuk menjadi acuan dalam pengembangan dan kreasi produk UKM, agar produk yang dihasilkan langsung bisa diserap pasar" Tawaran solusi tersebut masih sangat umum, seharusnya Diskop UKM dapat memberikan solusi yang lebih taktis dan operasional. Yang juga harus diperhatikan dengan lebih cermat adalah Program-program yang ditujukan untuk UMKM di tahun 2023 mengapa tidak ada yang dibuat untuk mendorong inovasi dan literasi IT?</p>		<p>g. Program-program yang taktis, operasional dan sudah dilaksanakan bagi UMKM untuk mendorong inovasi dan literasi IT dan belum tertuang di dalam Renstra namun sudah masuk di dalam dokumen perencanaan anggaran antara lain adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM • Pelatihan Digital Marketing Tingkat Lanjut • Bimtek Optimalisasi Gadget untuk menjadi reseller handal bagi generasi muda • Bimtek Design Produk Fashion dan Craft • Bimtek pencatatan Keuangan Berbasis Aplikasi • Fasilitasi dan pendampingan masuk platform M-Biz Market • Fasilitasi dan pendampingan masuk e-Katalog • Fasilitasi dan pendampingan penggunaan transaksi cashless QRis 	<p>Program taktis terlaksana sesuai dengan jawaban dalam rencana tindak lanjut di Tahun Anggaran 2024.</p>
	<p>h) Agar saat melakukan perencanaan dan penganggaran, Diskop UKM membuat program dan kegiatan yang berbasis kebutuhan UMKM yang spesifik misal: terkait inovasi, apa yg harus diinovasi?</p>		<p>h. Sudah Kami lakukan dengan beberapa metode antara lain melalui : Pembuatan kamus PUPM dan POKIR yang mengakomodir inisiatif pelaku usaha dan anggota dewan</p>	<p>Beberapa metode menyesuaikan kebutuhan diantaranya adalah pembuatan Kamus PUPM, POKIR dan adanya ASPIRASI dari Dewan, kemudian meraih angrgan DAK Fisik melalui beuty Contest Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu, Inisiasi</p>

			<p>Inisiasi meraih anggaran DAK melalui beauty Contest tingkat nasional untuk pembangunan PLUT Premium (PLUT yang mendukung optimalisasi potensi wisata.</p> <p>Inisiasi meraih Fasilitas pembangunan Factory Sharing dari BAPPENAS untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pasar produk olahan susu</p>	<p>Pembangunan Factory Sharing dari Bappenas Untuk olahan susu yang dilanjutkan oleh Pemprov DIY di wilayah Kabupaten Sleman, Fasilitas QRIS bagi pelaku Usaha Mikro bekerjasama dengan BUMN/BUMD, serta fasilitas sertifikasi halal self-declare bagi UMKM.</p>
--	--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 sebagaimana tertuang pada DPA yang terdiri dari 8 program, 13 kegiatan, dan 36 sub kegiatan berjalan baik dan lancar, dari anggaran sebesar Rp. 24.246.728.45,00 tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp. 22.016.303.535,60 atau sebesar 90,80 % dari target anggaran dan capaian kinerja fisik 100% dari target.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2024 menunjukkan konsistensi/kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Target kinerja keluaran (output) dari setiap kegiatan telah mendukung pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, RKPD, maupun APBD.

Namun demikian keberhasilan tersebut tentunya tidak akan terlepas faktor yang mendukung keberhasilan dan faktor yang penghambat antara lain :

Faktor Pendorong

1. Komitmen dan semangat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal dan terdistribusi dengan baik ke semua unit kerja.
2. Penentuan target kinerja yang realistis dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan.
3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pelaksanaannya selalu berubah-ubah, berdampak pada keterlambatan jadwal pelaksanaan.

LAMPIRAN

1. Matriks (Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024)
2. Data Inovasi Perangkat Daerah
3. Data Prestasi Perangkat Daerah

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2024**

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	24,246,728,345.00		22,016,303,535.60	90.80				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	24,246,728,345.00		22,016,303,535.60	90.80				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,092,273,722.00		5,709,974,010.80	93.72				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran					%	100.00	100.00	100.00
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja					%	100.00	100.00	100.00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,309,997.00		17,912,388.00	92.76				
1 Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu					%	100.00	100.00	100.00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,647,400.00		6,484,805.00	97.55				
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen	4	4	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,439,747.00		1,296,493.00	90.05				
1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,180,950.00		1,169,547.00	99.03				
1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3,624,600.00		3,325,435.00	91.75				
1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1,579,800.00		1,365,579.00	86.44				
1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,837,500.00		4,270,529.00	88.28				
1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan	18	18	100.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,562,425,152.00		4,265,455,455.00	93.49				
1 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu					%	100.00	100.00	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,380,952,352.00		4,087,090,373.00	93.29				
1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/Bulan	31	31	100.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175,863,700.00		172,829,063.00	98.27				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Dokumen	1	1	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5,609,100.00		5,536,019.00	98.70				
1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Laporan	16	16	100.00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,160,000.00		19,959,560.00	99.01				
1 Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu					%	100.00	100.00	100.00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20,160,000.00		19,959,560.00	99.01				
1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Dokumen	1	1	100.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	511,909,000.00		485,152,267.00	94.77				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum					%	100.00	100.00	100.00

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,864,650.00		20,181,169.00	88.26				
1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,680,800.00		2,680,000.00	99.97				
1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Jenis	2	2	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108,166,450.00		94,961,910.00	87.79				
1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket	2	2	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,056,200.00		10,835,196.00	98.00				
1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	1	1	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00		0.00	0.00				
1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					Dokumen	0	0	0
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14,125,000.00		13,399,100.00	94.86				
1 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					Laporan	12	12	100.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,737,700.00		108,698,579.00	98.16				
1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	5	5	100.00
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18,385,100.00		17,631,471.00	95.90				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Dokumen	2	2	100.00
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223,893,100.00		216,764,842.00	96.82				
1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dokumen	3	3	100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	502,732,650.00		486,866,577.80	96.84				



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah					%	100.00	100.00	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Laporan	1	1	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,450,000.00		87,499,880.00	96.74				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan	12	12	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	409,282,650.00		396,366,697.80	96.84				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Laporan	3	3	100.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	475,736,923.00		434,627,763.00	91.36				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD					%	100.00	100.00	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	141,482,500.00		108,235,511.00	76.50				
1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Unit	9	9	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	17,900,000.00		17,900,000.00	100.00				
1 Jumlah Mebel yang Dipelihara					Unit	5	5	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,028,500.00		36,928,650.00	92.26				
1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Unit	14	14	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276,325,923.00		271,563,602.00	98.28				
1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Unit	2	2	100.00



URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	33,095,000.00		26,803,629.00	80.99				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin					%	32.65	32.87	100.67
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	33,095,000.00		26,803,629.00	80.99				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin					%	32.65	32.87	100.67
Sub KegiatanFasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	33,095,000.00		26,803,629.00	80.99				
1 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untukKoperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Unit Usaha	30	82	273.33
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5,224,750.00		4,993,161.00	95.57				
1 Persentase koperasi aktif					%	78.67	78.15	99.34
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,224,750.00		4,993,161.00	95.57				
1 Persentase koperasi aktif					%	78.67	78.15	99.34
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	5,224,750.00		4,993,161.00	95.57				
1 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					Unit Usaha	10	13	130.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	87,849,300.00		86,136,731.00	98.05				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat					%	28.05	13.33	47.52

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	87,849,300.00		86,136,731.00	98.05				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat					%	28.05	13.33	47.52
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	87,849,300.00		86,136,731.00	98.05				
1 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					Unit Usaha	75	75	100.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	649,458,200.00		601,082,181.00	92.55				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikat					%	35.57	35.77	100.56
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	649,458,200.00		601,082,181.00	92.55				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikat					%	35.57	35.77	100.56
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	649,458,200.00		601,082,181.00	92.55				
1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					orang	425	465	109.41
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	243,398,725.00		241,872,515.00	99.37				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi					%	13.23	13.52	102.19
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	243,398,725.00		241,872,515.00	99.37				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi					%	13.23	13.52	102.19
Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	243,398,725.00		241,872,515.00	99.37				
1 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					Unit Usaha	12	10	83.33
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5,787,708,648.00		5,528,351,052.20	95.52				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin					UMKM	735	2675	363.95


URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	ANGGARAN	EFISIENSI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	5,787,708,648.00		5,528,351,052.20	95.52				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin					UMKM	735	2675	363.95
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1,629,189,950.00	50,281,248.00	1,545,912,567.80	94.89				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro					Unit Usaha	120	1735	1445.83
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	309,249,100.00		307,718,404.80	99.51				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					Unit Usaha	30	30	100.00
Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	354,363,100.00	32,685,020.00	312,563,682.80	88.20				
1 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					Unit Usaha	75	350	466.67
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	3,494,906,498.00	82,700,452.00	3,362,156,396.80	96.20				
1 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata					Unit Usaha	500	560	112.00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	11,347,720,000.00		9,817,090,255.60	86.51				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha					Usaha Mikro	13	20	153.85
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	11,347,720,000.00		9,817,090,255.60	86.51				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha					Usaha Mikro	13	20	153.85
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	11,347,720,000.00	1,452,201,948.00	9,817,090,255.60	86.51				
1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					Unit Usaha	460	460	100.00



DATA INOVASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024

No	Nama Inovasi	SK/SOP	Foto Kegiatan	Keterangan
1.	Geber Gaspol (Gerakan Bersama Gunakan Selalu Produk Berbahan Baku Lokal)	-	 <p style="text-align: center;">Foto dokumentasi <i>launching</i> program Geber Gaspol</p>  <p style="text-align: center;">Foto sampel snack dan konsumsi implementasi program Geber Gaspol</p>	<p>Gerakan ini merupakan langkah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong kesejahteraan petani lokal. Implementasinya adalah setiap rapat atau kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada Hari Rabu dan Jumat wajib menyediakan snack dan konsumsi berupa olahan yang berbahan baku dari lokal (non terigu).</p>
2.	Satu Sama Bunda (Satu UMKM Satu	SOP : Kegiatan "Satu Sama Bunda"		<p>Kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam</p>

No	Nama Inovasi	SK/SOP	Foto Kegiatan	Keterangan
	Mahasiswa Bibit Unggul Daerah)	<p>dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran peserta 2. Verifikasi peserta terpilih 3. Pendampingan intensif selama 2 (dua) bulan 	 <p>Foto Pembukaan Kegiatan Satu Sama Bunda yang dibuka langsung oleh Bupati Sleman</p>  <p>Foto Penutupan Kegiatan Satu Sama Bunda dan Penyerahan Sertifikat kepada Mahasiswa</p>	<p>rangka melakukan pendampingan serta pengembangan UMKM Kabupaten Sleman dengan berkolaborasi bersama GMedia dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sleman sebagai langkah konkret kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan juga akademisi.</p> <p>Pendampingan yang dilakukan terkait seputar permasalahan yang ada di UMKM peserta kegiatan, antara lain terkait pemasaran produk, digitalisasi, pembukuan dan berbagai permasalahan lain yang ada.</p>

No	Nama Inovasi	SK/SOP	Foto Kegiatan	Keterangan
3.	Gembira (Gerakan Pemuda Indonesia Berwirausaha)	<p>SOP :</p> <p>Kegiatan dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran peserta melalui link yang telah disediakan 2. Verifikasi peserta terpilih 3. Kegiatan In Class 4. Pendampingan oleh Years Tecnology 	 <p>Foto pelaksanaan kegiatan Gembira Batch 2, kolaborasi Dinkop UKM Sleman, Bank BPD dan Years Techonolgy</p> <p>Foto pelaksanaan kegiatan Gembira Batch 3, kolaborasi Dinkop UKM Sleman, Bank BPD dan Years Techonolgy</p>	<p>Kegiatan ini berjalan dengan kolaborasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Bank BPD DIY serta Years Techonology.</p> <p>Sasaran peserta pada kegiatan ini adalah para pemuda pelaku usaha atau pemuda yang memiliki minat dalam menjalankan usaha.</p>
4.	Sleman YEs (Sleman Young Entrepreneurs)	<p>SOP :</p> <p>Tujuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Jiwa Wirausaha 2. Memberikan ketrampilan Praktis 3. Membangun jejaring Bisnis 	 <p>Foto bersama kegiatan Graduation Peserta Sleman YEs</p>	<p>Adalah sebuah program kolaborasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dengan dunia pendidikan level menengah atas dan sederajat dalam hal</p>

No	Nama Inovasi	SK/SOP	Foto Kegiatan	Keterangan
		<p>Kriteria peserta : Siswa kelas XI yang memiliki motivasi tinggi dan ide bisnis yang inovatif</p> <p>Seleksi Peserta : Peserta diseleksi melalui wawancara dan penilaian proposal ide bisnis</p>	 <p>Foto pendampingan Peserta Sleman YEs</p>	<p>menciptakan penumbuhan wirausaha baru dari generasi muda. Adapun sebagai langkah awal bentuk kolaborasi ini adalah dengan SMK Negeri 2 Godean jurusan Tata Boga sebagai <i>pilot projectnya</i>.</p>
5.	Lapak UMKM Sembada	<p>SOP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mendaftar melalui link : bit.ly/lapak PLUT 2. Verifikasi kelengkapan legalitas dan berkas pendukung 3. Kurasi produk, komitmen peserta lapak 4. Bergabung di Lapak 	 <p>Foto Pelaksanaan Lapak UMKM Sembada</p>	<p>Lapak UMKM Sembada merupakan sarana promosi dan pemasaran bagi UMKM di Kabupaten Sleman. Selain itu, lapak UMKM sembada menjadi wadah untuk pendampingan para UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas serta pemasaran produk para pelaku usaha. Kegiatan ini mulai</p>

No	Nama Inovasi	SK/SOP	Foto Kegiatan	Keterangan
		UMKM Sembada 5. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib Lapak UMKM Sembada. Belum ada SK khusus untuk lapak UMKM Sembada		diinisiasi pada Maret 2024. Yang dilaksanakan setiap hari Jumat, pukul 07.00 WIB - 10.00 WIB di halaman PLUT KUMKM Sleman
6.	Sambung Rasa (Silaturahmi Bupati dengan Para Pelaku Usaha)	-	 <p>Sambung Rasa bersama Pelaku UMKM diwilayah Kapanewon Pakem</p>  <p>Sambung Rasa bersama Pelaku UMKM diwilayah Kapanewon Moyudan</p>	Kegiatan Sambung Rasa dilaksanakan sebagai media berdiskusi antara masyarakat dan Bupati untuk mendengar langsung apa saja yang menjadi kendala para pelaku UMKM di lapangan untuk mencari solusi bersama.

**DATA PRESTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
2024**

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Foto Piagam / Piala	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Nihil			

DATA PERKEMBANGAN KOPERASI TAHUN 2019-2024 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Uraian Data	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	410	407	420	419	422	421
	Koperasi Unit Desa (KUD)	17	17	17	16	17	17
	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	4	3	3
	Koperasi Kerajinan/Industri	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Pegawai Negeri RI	71	69	70	68	67	65
	Koperasi Karyawan	28	28	25	25	24	22
	Koperasi Angkatan Darat	7	7	5	6	6	6
	Koperasi Angkatan Udara	4	4	4	3	2	2
	Koperasi Kepolisian	2	2	2	2	2	2
	Koperasi Serba Usaha	92	90	87	81	80	79
	BMT/KJKS	36	36	-	-	-	-
	Koperasi Pasar	4	4	4	3	3	3
	Koperasi Simpan Pinjam	67	67	66	67	66	65
	Koperasi Angkutan Darat	2	2	4	3	3	3
	Koperasi Angkutan Udara				1	1	1
	Koperasi Wisata	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Wanita	9	9	10	10	10	10
	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Wredatama	5	5	5	5	5	5
	Koperasi Pepabri	13	12	13	13	13	13
	Koperasi Mahasiswa	8	8	8	6	5	5
	Koperasi Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	-	-
	Koperasi Pertanian	13	13	13	15	15	16
	Koperasi Perikanan	-	-	1	0	0	0
	Koperasi Peternakan	4	4	4	4	3	3
	Koperasi Pusat/Sekunder	-	2	-	2	2	2
	Kopti	1	1	1	1	1	1
	Koperasi Jasa	20	20	-	-	-	

No	Uraian Data	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Koperasi Konsumen	-	-	-	-	-	
	Koperasi Produksi	-	-	-	-	-	
	Koperasi Pemasaran	-	-	-	-	-	
	Koperasi Lainnya	-	-	36	41	52	58
	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	-	-	36	37	36	34
	Koperasi Perkebunan	-	-	1	1	1	1
	Koperasi Profesi	-	-	1	1	1	1
	Koperasi Nelayan				1	1	1
2	Jumlah Anggota Koperasi	292.008	226.85	229.831	186.893	183.025	167.084
3	Jumlah Manajer (Orang)	108	91	85	81	74	73
4	Jumlah Karyawan (Orang)	2.891	1.704	1.524	1.31	1.158	1.136
5	Jumlah Koperasi RAT	410	227	206	196	201	216
6	Penerbitan Badan Hukum Koperasi	11	5	12	4	5	9
7	Penilaian Kesehatan USP/KSP:						
	Sehat	24	31	13	15	21	10
	Cukup Sehat	114	108	65	60	54	65
	Dalam Pengawasan (Kurang Sehat)	7	6	1	-	-	-
	Dalam Pengawasan Khusus (Tidak Sehat)	-	-	-	-	-	-
8	Kondisi Koperasi						
	Koperasi Aktif	383	341	326	326	330	329
	Koperasi Tidak Aktif	27	66	94	93	92	92

DATA JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN KAPANEWON/KECAMATAN TAHUN 2019-2024 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KAPANEWON / KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	MOYUDAN	11	11	11	11	11	11
2.	GAMPING	25	25	26	27	27	24
3.	SLEMAN	58	56	57	59	59	60
4.	TEMPEL	18	18	18	19	16	19
5.	TURI	14	13	13	13	14	15
6.	SEYEGAN	14	13	14	14	16	16
7.	GODEAN	13	14	14	14	15	15
8.	MLATI	32	31	31	31	30	31
9.	KALASAN	24	24	27	26	28	28
10.	NGEMPLAK	18	19	18	19	21	18
11.	CANGKRINGAN	15	15	16	16	16	16
12.	MINGGIR	11	11	11	11	11	12
13.	DEPOK	70	68	67	63	60	58
14.	BERBAH	12	12	12	11	12	11
15.	PRAMBANAN	14	14	15	14	17	16
16.	NGAGLIK	36	39	44	44	43	45
17.	PAKEM	25	24	26	27	26	26
	JUMLAH	410	407	420	419	422	421

BADAN HUKUM KOPERASI TERBIT TAHUN 2024

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	JENIS KOPERASI
1	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN MATAHARI AMBARRUKMO	AHU-0001797.AH.01.29.TAHUN 2024	6/3/2024	Jalan Laksda Adisucipto Nomor 80 Caturtunggal	KONSUMEN
2	KOPERASI JASA PENA SEMBADA SEJAHTERA	AHU-0005080.AH.01.29.TAHUN 2024	12/20/2024	Watugajah 06 RT/RW 003/013 Sendangagung Minggir Sleman	JASA
3	KOPERASI KONSUMEN BANGUN BERSAMA INDONESIA DISINGKAT KBBI	AHU-0000894.AH.01.29.TAHUN 2024	3/21/2024	Jalan Besi Jangkang Km.1 Dukuh Klidon	KONSUMEN
4	KOPERASI JASA PENGELOLAAN SAMPAH SLEMAN SEMBADA	AHU-0003410.AH.01.29.TAHUN 2024	9/17/2024	Jalan Baransari Kios No. 1 RT/RW 004/023 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman	JASA
5	KOPERASI PEMASARAN FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	AHU-0004617.AH.01.29.TAHUN 2024	12/2/2024	Jalan Kaliurang Km.14 No.15 Dusun Tegalmanding Umbulmartani	PEMASARAN
6	KOPERASI PRODUSEN PETANI SEHAT SLEMAN	AHU-0002275.AH.01.29.TAHUN 2024	7/3/2024	Jamblangan Purwobinangun Sleman	PRODUSEN
7	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI DAERAH SLEMAN	AHU-0004067.AH.01.29.TAHUN 2024	10/28/2024	Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 38, Beran Kidul	KONSUMEN
8	KOPERASI JASA SYARIAH SETYA MUKTI SEJAHTERA GRUP	AHU-0002112.AH.01.29.TAHUN 2024	6/22/2024	Ruko Mustika Grup Jalan Magelang Km.16 Surowangsan Margorejo Tempel	JASA
9	KOPERASI KONSUMEN GIRI SEMBADA SEJAHTERA	AHU-0005228.AH.01.29.TAHUN 2024	12/31/2021	Sukorejo Girikerto Turi Sleman	KONSUMEN

DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PER BIDANG USAHA TAHUN 2021-2024

NO	SEKTOR USAHA (PDRB)	2021				2022				2023				2024			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	4.237	2	-	4.239	4.274	-	-	4.274	6.753	7	0	6.760	6,798	7	0	6,805
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	54	-	-	54	55	-	-	55	71	0	0	71	71	0	0	71
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.397	134	2	9.533	9.666	2	1	9.669	10.783	19	1	10.803	10,801	19	1	10,821
4	PENGADAAN LISTRIK, GAS	280	-	-	280	280	-	-	280	491	0	0	491	496	0	0	496
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	166	-	-	166	167	-	-	167	227	0	0	227	226	0	0	226
6	KONSTRUKSI	332	10	2	344	343	1	-	344	445	2	1	448	451	2	1	454
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	25.131	402	15	25.548	25.637	9	1	25.647	29.007	105	5	29.117	29,014	105	5	29,124
8	TRANSPORTASI DAN PEGUDANGAN	511	29	5	545	541	5	-	546	684	5	1	690	687	5	1	693
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	21.302	35	-	21.337	21.625	1	-	21.626	25.297	9	0	25.306	25,414	11	0	25,425
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	323	1	-	324	327	-	-	327	404	2	0	406	404	2	0	406
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	14	1	-	15	15	-	-	15	20	0	0	20	21	0	0	21
12	REAL ESTAT	24	-	-	24	24	-	-	24	25	3	0	28	25	3	0	28

NO	SEKTOR USAHA (PDRB)	2021				2022				2023				2024			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
13	JASA PERUSAHAAN	303	7	-	310	310	-	-	310	343	1	0	344	345	1	0	346
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6	-	-	6	6	-	-	6	8	0	0	8	8	0	0	8
15	JASA PENDIDIKAN	210	-	-	210	217	-	-	217	301	0	0	301	305	0	0	305
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	137	-	-	137	142	-	-	142	196	0	0	196	199	0	0	199
17	JASA LAINNYA	26.770	29	-	26.799	26.906	1	1	26.908	34.520	15	3	34.538	34,696	15	3	34,714
TOTAL		89.197	650	24	89.871		90.535	19	3	109.575	168	11	109.754	109,961	170	11	110,142

**DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN KAPANEWON/KECAMATAN TAHUN 2021-2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN**

NO	NAMA KECAMATAN	2021				2022				2023				2024			
		MIKRO	KECIL	MENE- NGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE- NGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE- NGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE- NGAH	JUMLAH
1.	MOYUDAN	3.854	56	3	3.913	3.933	3	-	3.936	5.315	10	0	5.325	5.332	10	0	7915
2.	GAMPING	5.405	44	2	5.451	5.481	-	-	5.481	7.835	4	1	7.840	7.909	5	1	7991
3.	SLEMAN	8.163	37	4	8.204	8.229	2	2	8.233	9.078	15	2	9.095	9,283	16	2	5342
4.	TEMPEL	6.536	40	4	6.580	6.606	5	-	6.611	7.404	32	1	7.437	7,407	32	1	4433
5.	TURI	3.726	18	-	3.744	3.770	-	-	3.770	4.184	4	0	4.188	4,184	4	0	5996
6.	SEYEGAN	5.249	41	1	5.291	5.338	1	-	5.339	5.981	2	0	5.983	5994	2	0	7369
7.	GODEAN	7.044	14	-	7.058	7.183	1	-	7.184	7.984	4	0	7.988	7987	4	0	10734
8.	MLATI	6.302	37	-	6.339	6.377	-	-	6.377	7.353	12	1	7.366	7.356	12	1	5101
9.	KALASAN	7.130	54	-	7.184	7.210	1	-	7.211	7.946	9	0	7.955	7.956	9	0	5040
10.	NGEMPLAK	5.230	28	-	5.258	5.284	1	-	5.285	5.963	4	1	5.968	5.966	4	1	7965
11.	CANGKRINGAN	2.204	36	1	2.241	2.241	2	1	2.244	2.755	5	0	2.760	2.757	5	0	5971
12.	MINGGIR	4.086	5	-	4.091	4.096	-	-	4.096	4.433	1	0	4.434	4.432	1	0	8301
13.	DEPOK	9.044	121	-	9.165	9.246	-	-	9.246	10.703	24	1	10.728	10.709	24	1	9301
14.	BERBAH	4.216	16	-	4.232	4.268	-	-	4.268	5.083	1	0	5.084	5.100	1	0	7440
15.	PRAMBANAN	2.765	17	1	2.783	2.827	-	-	2.827	5.019	8	1	5.028	5.031	8	1	4188
16.	NGAGLIK	4.767	48	4	4.819	4.903	2	-	4.905	8.254	27	2	8.283	8.272	27	2	4293
17.	PAKEM	3.476	38	4	3.518	3.543	1	-	3.544	4.285	6	1	4.292	4.286	6	1	2762
	JUMLAH	89.197	650	24	89.871	90.535	19	3	90.557	109.575	168	11	109.754	109.961	170	11	110142